

SKRIPSI**FUNGSI PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN
FIDUSIA**

Per 138 /05
Her
+



OLEH :

HERMI GRESIA T.

NIM : 030015080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



FUNGSI PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



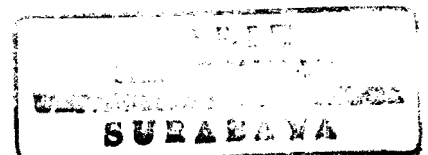
Lisman Iskandar, S.H., MS.
NIP. 130 675 526

Penyusun



Hermi Gresia T.
NIM : 030015080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian fidusia dirasakan lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat sekarang ini, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia, sehingga dengan demikian diharapkan pemberi fidusia yang mendapatkan keuntungan ekonomis dari hal tersebut, dapat memenuhi prestasinya pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan tujuan menjamin kepastian hukum, maka Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pendaftaran untuk sah nya sebuah perjanjian fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang daerah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili dari si pemberi fidusia. Bila pendaftaran telah dilakukan, maka para pihak dapat menikmati kelebihan-kelebihan yang dijamin undang-undang tersebut. Walaupun Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang didaftarkan adalah benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi penting bagi kita untuk menafsirkan bahwa yang didaftarkan bukan hanya benda objek jaminan fidusianya, tetapi juga meliputi ikatan jaminan fidusia, dengan semua janji-janjinya. Dengan demikian, semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia berlaku dan mengikat, tidak hanya bagi penerima dan pemberi fidusia, tetapi berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga juga,

sehingga pendaftaran tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pemberi fidusia/debitor, penerima fidusia/kreditor, dan pihak ketiga.

- b. Ternyata pengaturan mengenai pendaftaran fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, juga telah menimbulkan persoalan-persoalan yang spesifik di dalam prakteknya. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut, para pihak mengalami kesulitan, bahkan dirasakan merugikan para pihak, antara lain adalah mengenai lokasi Kantor Pendaftaran Fidusia yang sampai sekarang hanya ada di ibukota-ibukota propinsi; biaya pendaftaran fidusia yang ditentukan dengan sistem berjenjang; mengenai pernyataan pendaftaran fidusia yang dibuat oleh penerima fidusia; dan persoalan yang terakhir adalah mengenai pendaftaran benda objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan.

2. Saran

- a. Para pihak yang akan menggunakan perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, harus terlebih dahulu mencari tahu mengenai perjanjian fidusia. Para pihak harus memahami bahwa jaminan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai syarat sahnya perjanjian fidusia.. Dengan adanya pendaftaran tersebut, harus pula dipahami apa-apa saja yang

menjadi akibat-akibat hukum dari pendaftaran tersebut, sebab akibat hukum tersebut tidak selalu bernilai positif bagi kepentingannya, tetapi terkadang juga bernilai negatif bagi kepentingannya. Dengan adanya pemahaman yang sungguh-sungguh mengenai perjanjian fidusia, diharapkan para pihak dari awal para pihak telah menyadari konsekuensi-konsekuensi yang akan diterimanya karena memilih perjanjian fidusia sebagai jaminan dari perjanjian pokoknya.

- b. Pemerintah hendaknya segera mengadakan perbaikan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan persoalan-persoalan pada prakteknya, diantaranya : mendirikan Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II; menetapkan suatu rumus penghitungan baru biaya pembuatan akta fidusia sehingga diperoleh besar biaya pembuatan akta yang proporsional dengan besarnya nilai jaminan disertai dengan penegasan bagi para notaris untuk memungut biaya sesuai dengan peraturan pemerintah; mengadakan peninjauan ulang mengenai pernyataan pendaftaran jaminan fidusia mengingat pernyataan tersebut akan lebih sesuai bila datang dari pihak Kantor Pendaftaran Fidusia; mengadakan penjelasan dari pasal 11 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dapat diketahui bahwa dengan dicoretinya benda tersebut dari Buku Daftar Fidusia, maka benda tersebut tidak lagi menjadi benda terdaftar;

mencari solusi untuk masalah kepastian hukum dari pendaftaran objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan.

